



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YOHANES OKTOVIANUS
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 625683

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 5.895.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1610 m2/448 m2 di KAB / KOTA SUMBA BARAT DAYA, HASIL SENDIRI Rp. 4.645.000.000
2. Tanah Seluas 5200 m2 di KAB / KOTA SUMBA BARAT DAYA, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 888 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000
4. Tanah Seluas 1115 m2 di KAB / KOTA SUMBA BARAT DAYA, WARISAN Rp. 215.000.000
5. Tanah Seluas 267 m2 di KAB / KOTA SUMBA BARAT DAYA, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 223.500.000**

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, FORD RANGER 2.9 4X4 MT Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. MOTOR, YAMAHA VIXION Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY STYLES Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 18.500.000
5. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 510.750.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	19.170.729
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	31.523.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	6.679.943.729
III. HUTANG	Rp.	196.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.483.943.729

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DINAR SUSANTO
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 774884

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.000.000
III. HUTANG	Rp.	93.301.671
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-92.301.671

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.